



Tadris MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Vol. 2 No. 1 Mei 2023

*p-ISSN:*

*e-ISSN:*

## PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

Siti Rochaya<sup>1)</sup>, Siti Asmanah<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Mahasiswa Pascasarjana Unisma Bekasi

<sup>1)</sup>[bunda.siti469@gmail.com](mailto:bunda.siti469@gmail.com), <sup>2)</sup>[sitiasmanah71@gmail.com](mailto:sitiasmanah71@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembangunan nasional dalam perspektif pendidikan. Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis konsep pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan, perlu dipahami unsur apa saja yang diperlukan serta faktor dan piranti apa saja yang diperlukan untuk membangun pendidikan secara berkelanjutan. Adapun langkah Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun pendidikan nasional, diantaranya 1. Berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi, 2) Mengukur pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan, 3) Menyelaraskan sistem dengan komitmen pembelajaran, 4) Mendukung guru dalam proses belajar mengajar. 5) Mengadaptasi pendekatan dalam mengambil kebijakan pendidikan. Dukungan dalam mengadaptasi kebijakan sehingga sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah Pusat perlu memetakan daerah yang perlu bantuan ekstra agar kebijakan yang dilahirkan dapat fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan elemen masyarakat lain, seperti organisasi akar rumput maupun pihak swasta, dalam mendesain dan menjalankan inovasi pendidikan.

**Kata Kunci:** *Konsep Pembangunan, Kebijakan, Pendidikan*

**Abstract:** The aim of this research is to understand the concept of national development from an educational perspective. To prepare development plans based on the concept of sustainable development in education, it is necessary to understand what elements are needed as well as what factors and tools are needed to build education in a sustainable manner. The Policy and Planning steps in developing national education include 1. Committing to mastering basic literacy and numeracy skills, 2) Measuring learning regularly, accurately and relevantly, 3) Aligning the system with learning commitments, 4) Supporting teachers in the teaching and learning process. 5) Adapting approaches in making education policies. Support in adapting policies to suit local context. The Central Government needs to map areas that need extra assistance so that the policies produced can focus on improving the quality of learning. Meanwhile, local governments can also collaborate with other elements of society, such as grassroots organizations and the private sector, in designing and implementing educational innovations.

**Keywords:** *Development Concept, Policy, Education*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah kata yang sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan diartikan sebuah usaha sadar dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan setiap perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam hitungan skala yang lebih luas (Alfirzan et al., n.d.; Guru, n.d.; Zidna Faojan Adima UIN Sunan Gunung Djati Bandung, n.d.). Pendidikan diartikan sebagai pengembangan paradigma intelektual. Dalam paradigma ini, peserta didik diharapkan akan memiliki kesiapan mental dan kemampuan teoritik dalam menjalani kehidupannya yang selalu berubah dalam kompleksitas modern. Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja dikalangan warga masyarakat. Pendidikan dapat juga menjadi bagian dari instrument untuk membangun dan memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga dengan mengukuhkan ikatan-ikatan social, tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional (Supriyanto & Wahyudi, 2017).

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani-rohani. Perubahan sosial merupakan sebuah tubuh baru dari kondisi yang lama. Perubahan sosial terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia, inovasi, kemajuan sains dan sebagainya (Ibrahim et al., 2013; Rahmat Rifai Lubis, 2020; Rohman & Hairudin, 2018).

Berdasarkan paparan perubahan sosial tersebut para ilmuwan sosial membagi perubahan sosial kedalam dua bagian, yang pertama perubahan sosial evolusioner dan yang kedua, perubahan sosial revolusioner. Perubahan sosial jenis pertama sama dengan pergerakan sejarah yakni terjadi secara perlahan-lahan dan kumulatif. Sementara yang jenis kedua terjadi dengan cepat tanpa diprediksi sebelumnya. Perubahan sosial dalam bidang pendidikan lebih mendominasi pada jenis yang pertama (Amrulloh, 2017).

Pendidikan merupakan hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Suatu negara dianggap jauh dan tertinggal dari negara lain, manakala kualitas pendidikannya rendah. Kualitas pendidikan di Indonesia pada dewasa ini sangat memprihatinkan. Ini terbukti di antaranya dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun (Anggreni & Wyan Suartini, 2019; Azmy, 2015; Wahid Tahir et al., 2017; Yuni et al., 2016).

Inovasi pendidikan di Indonesia sudah waktunya bersumber dari para praktisi pendidikan di lapangan, terlebih pada kehidupan di era global dengan berbagai persoalan telah menuntut berbagai perubahan pendidikan yang bersifat mendasar. Iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang kurang kondusif, yang cenderung mengarah pada kebebasan yang kurang terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam sebuah tatanan akar rumput, hal tersebut telah menimbulkan berbagai gejala serta permasalahan social. Belum lagi pendidikan kita yang masih terkesan semrawutan (chaos) dan ketimpangan, baik secara kualitas, kuantitas, maupun kaitannya dengan efektivitas dan relevansi pendidikan, bahkan ada yang menganggap pendidikan kita sangat kacau, tidak jelas arah dan tujuannya. Maka dari itu, penting melihat pembangunan pendidikan dari prespektif Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun pendidikan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Problematika Pendidikan di Indonesia

Banyak hal yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dewasa ini, penguasaan terhadap teknologi menjadi hal yang penting dan prestise, karena dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (high technology), sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal (*failed country*). (Damanhuri et al., 2013; Riset et al., 2020)
2. Pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk pada gilirannya akan menambah jumlah rumah tangga dan dengan demikian bertambah pula kebutuhan rumah. Sementara itu kenaikan pendapatan masyarakat ternyata berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan harga rumah. Dengan demikian kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahannya pun juga cenderung menurun.
3. meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
4. Menurunnya kualitas pendidikan.
5. Kurangnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.
6. Minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada kemajuankemajuan
7. Pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik dan uniformistik.
8. Rendahnya kualitas pembelajaran. Permasalahan mendasar yang perlu di benahi dapat dinyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan sasaran yang sangat besar dan multistratum. Selain problematika tersebut, terdapat masalah lain, diantaranya: (1) Rendahnya Kualitas Sarana Fisik, sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya telah rusak, kepemilikan dan penggunaan media pembelajaran yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. (2) Rendahnya Kualitas Guru, keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 tentang Sisdiknas yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan sebuah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Amirudin, 2019; firda rahmayani, bahri, 2020; Priyanto, 2014; A. M. Saleh, n.d.).

## **2. Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun pendidikan**

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, seorang guru harus mampu meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai pendidik. Sebagai pendidik guru harus mampu meningkatkan pengetahuannya secara mandiri. Melalui membaca guru akan dapat mengembangkan diri dalam menambah ilmu pengetahuannya. Maka dari itu, budaya membaca di dalam kalangan guru perlu dibangun. Dengan membaca guru akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya serta mampu menambah wawasan yang belum diketahui olehnya. Selain itu ada beberapa langkah Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun pendidikan nasional.

### **1. Berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi**

Dalam *Policy Paper "Focus to Flourish: Five Actions to Accelerate Progress in Learning"* yang diterbitkan oleh RISE Programme, ditekankan bahwa komitmen terhadap pembelajaran dasar harus menjadi prioritas politik yang mendesak agar perubahan segera terjadi dan dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan anggaran dan program. Pentingnya kemampuan literasi numerasi dapat dicermati melalui contoh berikut,

seorang siswa belajar konsep perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat. Dua kali tiga adalah enam. Hasil tersebut tetap sama walaupun soal diganti dengan tiga kali dua. Namun, akan berbeda ketika diberikan dalam situasi pemberian obat. Aturan pemberian obat dua kali tiga dengan tiga kali dua akan memberikan efek penyerapan dan penyembuhan yang berbeda. Dengan penguasaan konsep perkalian bilangan bulat dan kemampuan numerasi yang baik siswa akan mampu menjelaskan alasan mengapa efek penyerapan obat itu berbeda. (Stti Quratul Ain, 2023)

## 2. Mengukur pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan

Mengukur pembelajaran perlu dilakukan bukan untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa, bagus atau tidaknya kualitas sekolah, melainkan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai kemampuan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Di tingkat kelas, asesmen diperlukan untuk melihat kemajuan pembelajaran tiap siswa. Hal ini penting dilakukan karena berdasarkan analisis tim peneliti RISE dalam Profil Pembelajaran, jika anak-anak Indonesia tidak menguasai kemampuan dasar numerasi pada kelas 6, maka kemungkinan besar mereka tidak akan pernah menguasainya meski terus naik kelas. Padahal, tujuan asesmen yang baik adalah untuk memberi informasi sedini mungkin kualitas pembelajaran yang sedang berlangsung.

Tes yang digunakan dalam asesmen harus dapat membandingkan kemajuan belajar siswa secara berkala alih-alih yang bersifat penilaian di akhir pembelajaran. Oleh karena itu, mindset dari guru, sekolah, serta Pemerintah juga perlu diubah dari yang sebelumnya *“Assessment of Learning”* menjadi *“Assessment for Learning”*. Di tingkat sekolah dan daerah, asesmen penting untuk menilai kinerja sistem pendidikan secara lebih luas. Dengan begitu, pembuat kebijakan dapat menentukan intervensi yang tepat untuk membantu para siswa agar dapat belajar sesuai dengan tujuan pendidikan.

### Menyelaraskan sistem dengan komitmen pembelajaran

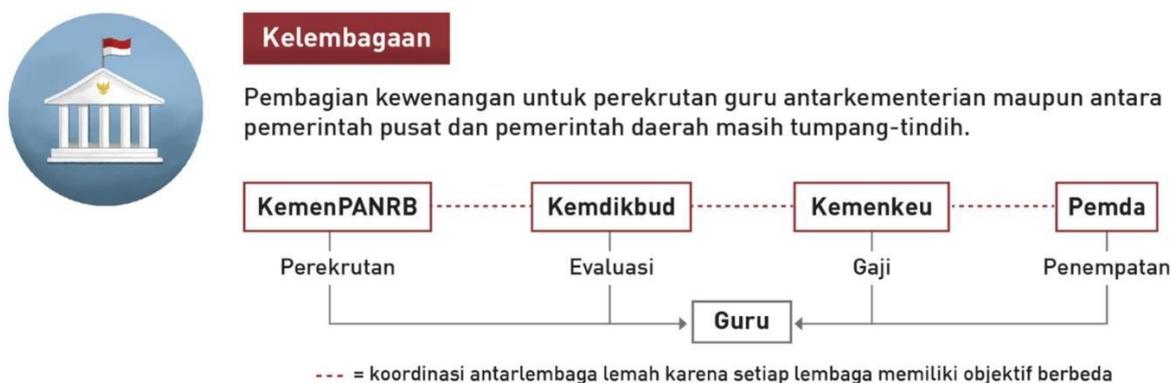
Tujuan sistem pendidikan hanya bisa tercapai bila berbagai elemen di dalamnya berjalan dengan selaras dan mengarah kepada tujuan atau komitmen yang sama. Keselarasan berbagai elemen dalam sistem pendidikan perlu terwujud di semua lapisan, mulai dari kebijakan di tingkat pusat, daerah, hingga kelas. Misalnya, ketika Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan pada tahun 1970-an, pemerintah membangun lebih dari 60.000 sekolah dasar melalui program Sekolah Dasar INPRES. Dua dekade kemudian, hampir seluruh anak Indonesia mampu mengenyam pendidikan dasar. Keselarasan dalam sistem pendidikan akan meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, dalam usaha perekrutan guru di Indonesia yang tumpang-tindih. Jika proses tersebut selaras, maka semua elemen ini akan turut andil dalam memajukan kualitas guru di Indonesia mulai dari sistem perekrutannya. Namun, sejauh ini kita tidak melihat ada peran dari politisi untuk mendorong peningkatan kualitas dalam perekrutan guru, begitu juga dengan elemen-elemen lain dalam sistem pendidikan ini.



Sumber: Kerangka kerja RISE.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan berupa rendahnya kualitas pendidikan yang tercermin dari rendahnya penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi. Oleh karena itu, berbagai elemen dalam sistem pendidikan perlu serempak memfokuskan perhatian pada tujuan atau komitmen untuk mengatasi masalah tersebut. Pada program pendidikan guru, misalnya, perlu diciptakan kurikulum yang membekali calon guru dengan pengetahuan mengenai cara mengajar literasi dan numerasi. Lalu pada perekrutan guru, perlu disepakati bahwa tujuannya adalah merekrut guru-guru yang berkualitas atau memiliki kompetensi mengajar yang baik. Studi RISE tentang perekrutan guru menemukan perekrutan guru selama ini belum berorientasi pada penyaringan guru yang berkualitas. Hal ini terjadi karena ada ketakselarasan komitmen di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan.

Pembagian kewenangan pada lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perekrutan guru—Kementerian PANRB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah masih tumpang-tindih. Setiap lembaga seolah memiliki tujuan masing-masing sehingga hasil perekrutan tidak optimal. Kenyataan ini turut berkontribusi pada rendahnya kinerja guru di Indonesia.



Sumber: Infografik "Perekrutan Guru di Indonesia: Disfungsi Kelembagaan dan Dinamika Sosial" (2020).

Contoh terwujudnya keselarasan pada sistem pendidikan di tingkat lokal ditemukan oleh studi RISE yang mengkaji inovasi pendidikan di tingkat daerah. Di Kota Yogyakarta, kepala daerahnya memiliki komitmen kuat terhadap kualitas pendidikan. Kepala daerah maupun birokratnya kerap mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar dapat memberikan pelayanan terbaik yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, terdapat inovasi pendidikan di Yogyakarta yang diinisiasi oleh masyarakat dan kemudian disahkan menjadi kebijakan lokal. Rasa percaya warga yang kuat terhadap pimpinan daerah dan jajarannya mendorong mereka untuk seia sekata menjalankan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan.

#### 4. Mendukung guru dalam proses belajar mengajar

Guru perlu mendapat bekal dan dukungan yang memadai untuk dapat mengajar secara efektif. Dukungan tersebut diberikan sejak calon guru mengenyam pendidikan di program pendidikan keguruan maupun pendidikan profesi guru (prajabatan) hingga selama guru menjalani profesinya (dalam jabatan). Guru yang berkualitas adalah guru yang mampu mempraktikkan pengajaran yang efektif. Oleh karena itu, untuk menciptakan dan mempertahankan guru yang berkualitas, dukungan ini harus berjalan secara berkesinambungan agar mereka dapat mengajar dengan efektif secara terus-menerus. (Yunus, Y., Suardi, 2019) Namun, studi RISE yang mengevaluasi pendidikan guru menemukan bahwa lulusan program Pendidikan Profesi Guru/PPG prajabatan merasa ilmu yang mereka peroleh dari program tersebut terlalu teoretis dan tidak membantu mereka dalam menghadapi tantangan

mengajar di dalam kelas (Buchanan, 2020; E. Hunt Esco, 2019; Fathurrahman et al., 2016; Gay, 2010; Hismanog̃lu & Hismanog̃lu, 2010; Powell et al., 2014; Rusdiana et al., n.d.). Program pendidikan guru juga belum memberi pembekalan yang memadai bagi calon guru untuk dapat mengajar literasi dan numerasi. Padahal, rendahnya penguasaan kemampuan literasi dan numerasi dasar pada siswa Indonesia menjadi akar masalah dari rendahnya hasil pembelajaran siswa Indonesia selama bertahun-tahun.



Sumber: Infografik "Perkembangan Hasil Studi Evaluasi Program PPG Prajabatan-Studi Tahun Pertama" (2018).

Oleh karena itu, program pendidikan guru perlu lebih fokus membekali calon guru dengan pengetahuan mengenai cara mengajar yang efektif, khususnya dalam mengajar literasi dan numerasi. Jadi, guru bukan sekadar menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dukungan yang diberikan kepada guru dapat disesuaikan dengan level kompetensinya. Dukungan untuk guru baru, misalnya, tentu berbeda dengan dukungan yang diperlukan guru yang sudah mengajar selama bertahun-tahun. Guru baru memerlukan induksi atau pendampingan yang memadai dalam masa transisi dari calon guru menjadi guru yang mengajar di dalam kelas. Sementara, guru yang sudah mengajar selama bertahun-tahun, yang memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, perlu mengembangkan keterampilan mengajarnya sesuai dengan perubahan zaman ataupun masalah yang dihadapi di kelasnya. Oleh karena itu, berdasarkan *Policy Paper "Focus to Flourish: Five Actions to Accelerate Progress in Learning"*, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian para pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung guru untuk mengajar dengan baik: 1. Memfokuskan kembali pengembangan profesional pada keterampilan mengajar, serta 2. Reformasi karier guru untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi guru agar dapat mengajar secara berkualitas.

## 5. Mengadaptasi pendekatan dalam mengambil kebijakan pendidikan

Desentralisasi pendidikan menimbulkan konsekuensi berupa masalah pendidikan yang bervariasi antarkabupaten/kota. Mengingat Indonesia adalah negara luas dengan 514 kabupaten/kota, maka pemecahan masalah pendidikan tidak bisa menggunakan pendekatan one size fits all, melainkan harus disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi tiap daerah. Studi RISE terkait inovasi kebijakan pendidikan di daerah meneliti beberapa kabupaten/kota untuk melihat adaptasi kebijakan untuk mengatasi krisis pembelajaran dan disesuaikan dengan keadaan sosial budayanya.

Di Kota Bukittinggi, misalnya, ada beberapa kebijakan pendidikan dibuat karena peran aktif kepala sekolah dan partisipasi keluarga, yaitu program supervisi silang dan sekolah keluarga. Meskipun tidak ada insentif, tetapi program-program ini dapat berjalan secara berkelanjutan di Bukittinggi karena jaringan kekerabatan yang sangat kuat. Sementara itu di Yogyakarta, pembelajaran didukung oleh partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat, yang biasa dikenal dengan Paguyuban Orang Tua dan Jam Belajar Masyarakat (JBM).

Kedua program ini didorong oleh tradisi kolaborasi di Yogyakarta: handarbeni dan guyub rukun. Namun, ternyata berdasarkan temuan RISE, banyak pemerintah daerah yang sebenarnya belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mendesain inovasi kebijakan pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dukungan dalam mengadaptasi kebijakan

sehingga sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah Pusat perlu memetakan daerah yang perlu bantuan ekstra agar kebijakan yang dilahirkan dapat fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan elemen masyarakat lain, seperti organisasi akar rumput maupun pihak swasta, dalam mendesain dan menjalankan inovasi pendidikan.

Sedangkan menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy empat Prioritas Perencanaan Pendidikan:

**a. Pembelajaran anak**

Pemerintah melalui mendikbud perlu mengecek ketepatan apakah yang diberikan oleh kementerian terserap oleh para peserta didik dan tenaga pendidik. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar hasil dan dampak dapat terpantau.

**b. Struktur kelembagaan**

Mendikbud menganggap bahwa struktur kelembagaan baik internal maupun eksternal badan akan mendukung tujuan pembelajaran. Struktur kelembagaan ini menurut Mendikbud, bisa berdampak positif juga terhadap kualitas pembelajaran.

**c. Menggerakkan revolusi mental di masyarakat.**

Pemerintah harus menyukseskan program revolusi mental, tidak dapat hanya dilakukan di sistem institusi pendidikan saja, tetapi juga masyarakat luas. "Jadi pengembangan karakter itu tidak hanya dari kurikulum saja, tidak hanya dari cara mengajar guru tetapi juga masyarakat luas. Ini yang akan kami kembangkan pada tahun ini," ujarnya.

**d. Pengembangan teknologi.**

Perkembangan teknologi ini, menurut Mendikbud akan membantu guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. "Pengembangan teknologi yang harus saya fokuskan, banyak sekali yang mengira pengembangan teknologi adalah mungkin untuk menggantikan guru masuk. Itu salah total. Fokus dari teknologi ini adalah untuk membantu semua manusia dalam sistem untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang lebih baik. Teknologi itu untuk memperbaiki, meng-*enhance*, meningkatkan kapasitas, bukan untuk *me-replace*, bukan untuk menggantikan kebiasaan. Melalui platform teknologi inilah kita akan mulai tetap fokus pada pengembangan," terang Mendikbud. Untuk mewujudkan keempat prioritas tersebut, maka pemerintah kerja sama dan gotong royong dari seluruh kementerian-kementerian, khususnya kementerian di bawah koordinasi Menko PMK. "Misalnya untuk Program Penguatan Karakter (PPK). Itu Perpresnya yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2017, dan itu harus dilakukan bukan hanya untuk satu kementerian tapi semua menteri terkait. Nah, ini nanti juga saya minta kita berkoordinasi untuk benar-benar merealisasikan PPK dalam rangka revolusi mental.

## PENUTUP

Kebijakan dan Perencanaan dalam membangun pendidikan nasional, diantaranya 1. Berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi, 2) Mengukur pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan, 3) Menyelaraskan sistem dengan komitmen pembelajaran, 4) Mendukung guru dalam proses belajar mengajar. 5) Mengadaptasi pendekatan dalam mengambil kebijakan pendidikan. Dukungan dalam mengadaptasi kebijakan sehingga sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah Pusat perlu memetakan daerah yang perlu bantuan ekstra agar kebijakan yang dilahirkan dapat fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan elemen masyarakat lain, seperti organisasi akar rumput maupun pihak swasta, dalam mendesain dan menjalankan inovasi pendidikan. Sedangkan menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy empat Prioritas Perencanaan Pendidikan: 1) Pembelajaran anak. 2) Struktur kelembagaan. 3) Menggerakkan revolusi mental di masyarakat. 4) Pengembangan teknologi. Untuk mewujudkan keempat prioritas tersebut, maka pemerintah kerja sama dan gotong royong dari seluruh kementerian-kementerian, khususnya kementerian di bawah

koordinasi Menko PMK. “Misalnya untuk Program Penguatan Karakter (PPK). Itu Perpresnya yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2017, dan itu harus dilakukan bukan hanya untuk satu kementerian tapi semua menteri terkait. Nah, ini nanti juga saya minta kita berkoordinasi untuk benar-benar merealisasikan PPK dalam rangka revolusi mental.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Acree, L., Acree, L., Gibson, T., Mangum, N., Wolf, M. A., Kellogg, S., & Branon, S. (2017). Supporting School Leaders in Blended Learning with Blended Learning. *Journal of Online Learning Research*, 3(2), 105–143.
- Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (n.d.). *Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan*.
- Amirudin, N. (2019). Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*, 181–192.
- Ampel, J. A. (2009). Character education: Examining the perceptions of elementary, middle, and high school teachers in a central Florida school district. *ProQuest Dissertations and Theses*, 183--n/a.  
[http://proxy.seattleu.edu:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/305094825?accountid=28598&http://primo.seattleu.edu/openurl/SEAU/seau%7B\\_%7Dservices%7B\\_%7Dpage?genre=unknown%7B&%7Dissn=9781109161533%7B&%7Djtitle=%7B&%7Datitle=%7B&%7Daulas](http://proxy.seattleu.edu:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/305094825?accountid=28598&http://primo.seattleu.edu/openurl/SEAU/seau%7B_%7Dservices%7B_%7Dpage?genre=unknown%7B&%7Dissn=9781109161533%7B&%7Djtitle=%7B&%7Datitle=%7B&%7Daulas)
- Amrulloh, M. A. (2017). ANALISIS PERUBAHAN FONOLOGIS DALAM PEMBENTUKAN KALIMAH MU'ARRABA. *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 4(2), 217–226.
- Angraini, A., Sutaman, S., & Al Anshory, A. M. (2021). Teacher's Personality as a Motivation in Arabic Learning: A Systematic Review Based on Five Professional Teacher Personality Frameworks. *Al-Ta'rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya*, 9(2), 145–154. <https://doi.org/10.23971/altarib.v9i2.3263>
- Angreni, P., & Wayan Suartini, N. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI 3 PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL (Studi pada Universitas di Provinsi Bali). In *ISEI Business and Management Review: Vol. III* (Issue 1). <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ibmr>
- Azmy, A. (2015). PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENCAPAI CAREER READY PROFESSIONAL DI UNIVERSITAS TANRI ABENG. In *BINUS BUSINESS REVIEW* (Vol. 6, Issue 2).
- Buchanan, R. (2020). An Ecological Framework for Supervision in Teacher Education. *Journal of Educational Supervision*, 3(1), 76–94. <https://doi.org/10.31045/jes.3.1.6>
- Corbett, M. (2020). Rural Teacher Education. In *Rural Teacher Education*. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-2560-5>

- Cornford, I. R. (2002). Learning-to-learn strategies as a basis for effective lifelong learning. *International Journal of Lifelong Education*, 21(4), 357–368. <https://doi.org/10.1080/02601370210141020>
- Damanhuri, A., Mujahidin, E., & Hafidhuddin, D. (2013). Inovasi Pengelolaan Pesantren dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v2i1.547>
- Darma, I. K., Karma, I. G. M., & Santiana, I. M. A. (2020). Blended Learning, Inovasi Strategi Pembelajaran Matematika di Era Revolusi Industri 4.0 Bagi Pendidikan Tinggi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, 3, 527–539.
- E. Hunt Esco, E. (2019). Teachers' Perceptions of Teaching Middle School Students Social Skills Using the Boys Town Well-Managed Schools Model. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fathurrahman, Wiyono, B. B., Bafadal, I., & Arifin, I. (2016). The Professional Teachers' Supervision by Qomaruddin Boarding School Foundation at SMK Assa'adah Bungah Gresik. *International Conference on Education*, 265--272.
- firda rahmayani, bahri, saipul hadi. (2020). Problematika Sistem Pembelajaran Full Day School Di Sd Islamic Center Samarinda. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran*, 7(2), 49–68.
- Fun, C. S., & Maskat, N. (2010). Teacher-Centered Mind Mapping vs Student-Centered Mind Mapping in the teaching of accounting at Pre-U level- An action research. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 7(2), 240–246. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.034>
- Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural diversity. *Journal of Teacher Education*, 61(1–2), 143–152. <https://doi.org/10.1177/0022487109347320>
- Guru, P. (n.d.). *Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*.
- Hall Haley, M., & Ferro, M. S. (2011). Understanding the perceptions of arabic and chinese teachers toward transitioning into U.S. schools. *Foreign Language Annals*, 44(2), 289–307. <https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2011.01136.x>
- Hişmanog̃ lu, M., & Hişmanog̃ lu, S. (2010). *ENGLISH LANGUAGE TEACHERS' PERCEPTIONS OF EDUCATIONAL SUPERVISION IN RELATION TO THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF NORTHERN CYPRUS* (Issue 1).
- I Made Sila. (2014). RASINALISASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENYEMPURNAAN POLA PIKIR PEMBELAJARAN. *Jurnal Widya Acharya FKIP Universitas Dwijendra I*, 2085, 1–15.
- Ibrahim, R., Nahdlatul, U., Unu, U., & Tengah, J. (2013). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL : Pengertian , Prinsip , dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam*. 7(1), 129–154.
- Kong, J. H., Shin, S. H., Lee, H. J., & Kim, T. Y. (2020). Arabic language teachers' perceptions of learners' motivation in South Korean universities. *Electronic Journal of Foreign Language Teaching*, 17(1), 243–257.
- Kutsiyyah, K. (2021). Analisis Fenomena Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi (Harapan Menuju Blended Learning). *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1460–1469. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/580>

- McGrath, V. (2013). The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs Memorial. *Canadian Journal of University Continuing Education*, 33(1). <https://doi.org/10.21225/d51g6h>
- Miftah, M. (2013). Pengembangan Karakter Anak Melalui Pembelajaran Ilmu Sosial. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(2), 204–217. <https://doi.org/10.21831/jpk.v2i2.1441>
- Mohamed, I., Asimiran, S., Mohd Daud, S., & Ahmad, S. (2015). Student Teachers Character Development in Teacher Education Institutes: A Review. *Jurnal Personalia Pelajar*, 18(1), 107–113.
- Nuryasin, M., & Mitrohardjono, M. (2019). STRATEGI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.2.77-84>
- Ofoego, O. C., & Ebebe, I. E. (2016). Reforms in Education: The Need for Re-Engineering Teacher Education for Sustainable Development. *Journal of Education and Practice*, 7(29), 195–199. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1118933&site=ehost-live>
- OLIVER, M., & TRIGWELL, K. (2005). Can “Blended Learning” Be Redeemed? *E-Learning*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.2304/elea.2005.2.1.2>
- Powell, A., Beth Rabbitt, I., & Kennedy, K. (2014). *iNACOL Blended Learning Teacher Competency Framework*.
- Pritchett, L., Newman, K., & Silberstein, J. (n.d.). *Focus to Flourish Five Actions to Accelerate Progress in Learning Focus to Flourish: Five Actions to Accelerate Progress in Learning Focus to Flourish Five Actions to Accelerate Progress in Learning 2*.
- Priyanto, D. (2014). PEMETAAN PROBLEMATIKA INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN SAINS DAN TEKNOLOGI. 19(2), 222–240.
- Rahmat Rifai Lubis, dkk. (2020). Pembelajaran Al-Qur’an Era Covid-19: Tinjauan Metode dan Tujuannya pada Masyarakat di Kutacane Aceh Tenggara. *Kutta: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.30736/ktb.v4i2.275>
- Rajovic, G., & Bulatovic, J. (2017). Geography education research in Serbia: A teacher’s perspective. *European Journal of Contemporary Education*, 6(1), 100–125. <https://doi.org/10.13187/ejced.2017.1.100>
- Riset, K., Teknologi, D. A. N., Riset, B., Nasional, D. A. N. I., Bidang, D., Riset, P., & Pengembangan, D. A. N. (2020). *Kementerian riset dan teknologi/ badan riset dan inovasi nasional*. 021, 6–8.
- Rohman, M., & Hairudin, H. (2018). Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-nilai Sosial-kultural. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603>
- Rusdiana, A., Huda, N., Muin, A., & Kodir, A. (n.d.). The Effectiveness of Educational Supervision in Increasing the Teacher’s Professional Competence in the Covid-19 Pandemic Period. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) (Vol. 14, Issue 5). [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net)
- Saleh, A. M. (n.d.). *Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran Di Indonesia*.

- Saleh, M. N. I., & Ahmad Zubaidi. (2020). Eksistensi Pendidikan Islam Basis Nilai, Perspektif, dan Inovasi Pengembangannya. In *Istana Agency* (Issue 1).
- Shaidullin, R. N., Safiullin, L. N., Gafurov, I. R., & Safiullin, N. Z. (2014). Blended Learning: Leading Modern Educational Technologies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 131(904), 105–110. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.087>
- Shakuna, K. S., Mohamad, N., & Ali, A. B. (2016). The effect of school administration and educational supervision on teachers teaching performance: Training programs as a mediator variable. *Asian Social Science*, 12(10), 257–272. <https://doi.org/10.5539/ass.v12n10p257>
- Spector, J. M. (2020). Learning, Design, and Technology. In *Learning, Design, and Technology*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-17727-4>
- Stacey, M. (n.d.). *The Business of Teaching Becoming a Teacher in a Market of Schools*.
- Stti Quratul Ain. (2023). Pemasalahan Pembelajaran Literasi Numerasi dan Karakter. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 6(2), 152–158.
- Suchyadi, Y., Karmila, N., Nurlela, N., Mirawati, M., Purnamasari, R., Sri Indriani, R., Wijaya, A., & Syahiril Anwar, W. (2019). INCREASING PERSONALITY COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS, THROUGH EDUCATION SUPERVISION ACTIVITIES IN BOGOR CITY. *JOURNAL OF COMMUNITY ENGAGEMENT (JCE)*, 01(01). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jce>
- Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2017). Skala karakter toleransi: konsep dan operasional aspek kedamaian, menghargai perbedaan dan kesadaran individu. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 61. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v7i2.1710>
- Wahid Tahir, H. A., Kementerian, K., & Sulawesi-Selatan, A. (2017). *PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN* (Vol. 1).
- Yuni, E., Dwi, W. ;, Sudjimat, A., & Nyoto, A. (2016). *TRANSFORMASI PENDIDIKAN ABAD 21 SEBAGAI TUNTUTAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA GLOBAL* (Vol. 1).
- Yunus, Y. (2020). E-LEARNING: PARADIGMA BARU DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN AGAMA. *Jurnal Teknologi Informasi ESIT*, XV(10), 8–12.
- Yunus, Y., Suardi, D. (2019). Al-Quran Learning Through Information Processing Model Ala Joyce and Weil MTs Works in The Village Lara Mulya Baebunta District District North Luwu. . . *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(2), 104–108.
- Zidna Faojan Adima UIN Sunan Gunung Djati Bandung, M. (n.d.). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. In *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 2, Issue 2).